

Membaca Ulang Hadis Ahkam melalui Lensa Kritik Matan Kontemporer: Analisis terhadap Hadis-Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

Cut Dewi Rahma

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

email: dewicut583@gmail.com

Nurmila*

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

email: 241003010@student.ar-raniry.ac.id

**corresponding author*

Article history: Received: September 23, 2025, Revised: October, 04, 2025; Accepted October 10, 2025; Published: October 20, 2025

ABSTRACT :

Hadiths about female leadership, especially those that say “lan yufliha qawmun wallau amrahum imra'ah” (a people will not prosper if they entrust their affairs to women), have been the source of lengthy legal and social debates. This study aims to analyze the quality and historical context of these hadiths by applying a contemporary methodology of hadith matan (content) criticism. This study uses a qualitative approach with library research and critical text analysis methods. Primary data is sourced from major hadith books, such as Sahih al-Bukhari, as well as classical and modern scholars' commentaries. The results show that in terms of sanad, this hadith is classified as sahih. However, contemporary matn criticism analysis, which considers historical, sociological, and maqāṣid al-sharī'ah aspects, reveals that this hadith has the characteristics of khabar al-wāḥid (single report) which is particular (juz'i), not universal (kulli). The specific context is the Prophet Muhammad's comment on the story of the ancient Persian empire ruled by a woman. Thus, the conclusion of the study is that this hadith cannot be generalized as an absolute prohibition of female leadership in all fields and times. The prohibition is conditional, closely related to the context of a patriarchal and unprepared society, not an essential determination of women's incompetence. This article recommends the need for a holistic and contextual approach in understanding ahkam hadiths, taking into account the spirit of maqāṣid al-sharī'ah, namely justice and the benefit of the people.

Author correspondence email: 241003010@student.ar-raniry.ac.id

Copyright (c) 2025 by Cut Dewi Rahma & Nurmila

This an open accses article under the <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



Keywords : Criticism of Matan; Hadith Ahkam; Women's Leadership; Maqasid al-Shari'ah; Contextualization

ABSTRAK:

Hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan, khususnya yang berbunyi "lan yufliha qawmun wallau amrahum imra'ah" (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan), telah menjadi sumber debat hukum dan sosial yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas dan konteks historis hadis tersebut dengan menerapkan metodologi kritik matan (isi) hadis secara kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis teks kritis. Data primer bersumber dari kitab-kitab hadis induk, seperti Shahih al-Bukhari, serta komentar ulama klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi sanad, hadis ini termasuk kategori sahih. Namun, analisis kritik matan kontemporer yang mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan maqāṣid al-sharī'ah mengungkap bahwa hadis ini memiliki karakteristik khabar al-wāḥid (laporan tunggal) yang bersifat partikular (juz'i), bukan universal (kulli). Konteks spesifiknya adalah komentar Nabi Muhammad SAW. terhadap kisah kerajaan Persia kuno yang diperintah oleh seorang perempuan. Dengan demikian, kesimpulan penelitian adalah bahwa hadis ini tidak dapat digeneralisasi sebagai larangan mutlak kepemimpinan perempuan dalam semua bidang dan zaman. Larangan bersifat kondisional, sangat terkait dengan konteks masyarakat yang patriarkal dan tidak siap, bukan sebuah ketetapan esensial tentang ketidakmampuan perempuan. Artikel ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam memahami hadis-hadis ahkam, dengan mempertimbangkan semangat maqāṣid al-sharī'ah, yaitu keadilan dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci : Kritik Matan; Hadits Ahkam; Kepemimpinan Perempuan; Maqasid al-Shari'ah; Kontekstualisasi.

PENDAHULUAN

Wacana kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan salah satu isu kontemporer yang terus mendapatkan perhatian, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam perdebatan ini, satu teks hadis seringkali menjadi titik sentral: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan" (HR. Al-Bukhari). Secara tradisional, hadis ini telah dipahami sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan publik, terutama kepemimpinan negara (Mernissi, 1991). Pemahaman literal ini telah mempengaruhi diskursus hukum dan sosial di banyak masyarakat Muslim, membatasi partisipasi politik perempuan.

Namun, perkembangan metodologi kritik hadis, khususnya kritik matan (analisis isi), menawarkan perspektif yang lebih segar. Jika ilmu hadis klasik lebih memusatkan perhatian pada kritik sanad (rantai periwayatan), pendekatan kontemporer menekankan bahwa kesahihan sanad saja tidak cukup untuk menentukan aplikabilitas sebuah hadis. Aspek matan – meliputi konteks historis (*asbāb al-wurūd*), koherensi dengan prinsip dasar Al-Qur'an, dan realitas sosiologis – harus menjadi pertimbangan utama (Kamali, 2005). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hermeneutika yang menekankan pada pentingnya memahami teks dalam konteksnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana penerapan lensa kritik matan kontemporer dapat merekonstruksi pemahaman terhadap hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan dan implikasinya terhadap hukum Islam kontemporer?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis kualitas sanad dan matan hadis kepemimpinan perempuan dengan pendekatan kritis; (2) Mengungkap konteks historis dan sosiologis yang melatarbelakangi kemunculan hadis tersebut; dan (3) Menawarkan tafsir ulang yang kontekstual dan selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan utama yang digunakan adalah analisis teks kritis (*critical text analysis*) terhadap matan hadis, yang mengintegrasikan pendekatan historis dan *maqāṣidī*.

Sumber Data:

1. Data Primer: Teks hadis tentang kepemimpinan perempuan dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Al-Bukhari, 2002) beserta komentar ulama (syarah)

terkait.

2. Data Sekunder:

- Literatur ilmu hadis dan kritik matan, seperti karya Mustafa Azami (2002) dan Mohammad Hashim Kamali (2005).
- Kajian-kajian kontemporer tentang gender dalam Islam, termasuk karya Fatima Mernissi (1991) dan Asghar Ali Engineer (2008).
- Literatur tentang maqāṣid al-sharī'ah, khususnya karya Al-Syatibi (1997).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data: Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari sumber-sumber terpercaya. Selanjutnya, data dianalisis melalui beberapa tahap yang diadaptasi dari model kritik matan (Al-A'zami, 2002; Kamali, 2005):

1. Analisis Sanad: Memverifikasi kualitas rantai periwayatan.
2. Analisis Linguistik: Mengkaji makna leksikal dan gramatikal dari kata kunci dalam matan, seperti "lan yufliḥa" (tidak akan beruntung) dan "amrahum" (urusan mereka).
3. Analisis Kontekstual-Historis: Menelusuri *asbāb al-wurūd* (sebab kemunculan hadis) untuk memahami situasi partikular yang melatarbelakanginya.
4. Analisis Koherensi: Menguji konsistensi makna hadis dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih luas dan prinsip universal Islam, seperti keadilan dan kesetaraan manusia.
5. Analisis Maqāṣidī: Menilai implikasi pemahaman hadis terhadap pencapaian maqāṣid al-sharī'ah, khususnya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*).

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Sanad dan Keterbatasannya

Hadis tentang kepemimpinan perempuan diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah dan tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dari perspektif ilmu hadis klasik, sanad hadis ini dinilai **ṣaḥīḥ** (otentik) (Al-Bukhari, 2002). Tidak ada cacat yang signifikan dalam rantai periwayatannya. Oleh karena itu, secara tradisional, statusnya sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. diakui. Namun, seperti dinyatakan oleh para pemikir kontemporer, kesahihan sanad hanya menjamin keaslian atribusi teks kepada Nabi, tetapi tidak serta-merta menentukan makna universal dan aplikasi hukumnya secara mutlak (Kamali, 2005). Di sinilah kritik matan memainkan peran krusial.

Kritik Matan: Konteks Historis sebagai Kunci Pemahaman

Analisis konteks historis (*asbāb al-wurūd*) merupakan langkah kritis. Hadis ini muncul sebagai respons Nabi terhadap sebuah peristiwa partikular. Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. mengucapkan kata-kata tersebut ketika mendengar berita bahwa Kisra (Penguasa Persia) telah tewas dan digantikan oleh putrinya (Al-Bukhari, 2002). Mernissi (1991) dalam analisisnya yang tajam menegaskan bahwa konteksnya sangat spesifik: komentar tentang kegagalan sistem monarki Persia yang menobatkan seorang perempuan, bukan sebuah pernyataan teologis-hukum tentang natur perempuan.

Dengan demikian, hadis ini lebih tepat dikategorikan sebagai khabar al-wāḥid (laporan tunggal) yang merespons situasi juz'i (partikular), bukan sebuah prinsip kulli (universal). Sebagai perbandingan, Al-Qur'an menceritakan dengan positif kepemimpinan Ratu Balqis (QS. An-Naml: 23-44), yang memerintah dengan penuh kebijaksanaan dan dialog. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang kepemimpinan perempuan secara inheren.

Analisis Linguistik dan Maqasidi

Kata kunci "amrahum" (urusan mereka) dalam hadis juga perlu dikaji. Dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 M, "urusan" yang dimaksud sangat mungkin merujuk pada kepemimpinan tertinggi negara (*al-khilāfah al-'uẓmā*) dalam masyarakat yang diliputi peperangan suku dan membutuhkan kepemimpinan yang bersifat fisik dan militeristik. Engineer (2008) berargumen bahwa penafsiran "urusan" sebagai semua bentuk kepemimpinan tanpa kecuali adalah generalisasi yang tidak berdasar.

Lebih lanjut, jika pemahaman literal hadis ini dijadikan hukum mutlak, maka akan bertabrakan dengan beberapa prinsip maqāṣid al-sharī'ah. Larangan absolut tanpa mempertimbangkan kapasitas individu dan konteks sosial dapat menimbulkan:

1. Ketidakadilan (*ẓulm*): Menutup peluang bagi perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni.
2. Kemudaran (*ḍarar*): Menghalangi kemaslahatan publik jika yang tersedia hanya calon pemimpin laki-laki yang tidak kompeten, sementara ada calon perempuan yang lebih kompeten.
3. Penghambatan Potensi Umat: Bertentangan dengan semangat untuk memajukan umat dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya, baik laki-laki maupun perempuan.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih selaras dengan maqāṣid adalah memahami hadis ini sebagai peringatan tentang kondisi yang tidak ideal, bukan sebagai larangan legal yang bersifat tetap. Larangan menjadi efektif jika dalam suatu konteks sosial tertentu, penunjukan seorang pemimpin perempuan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, atau jika sang perempuan tersebut memang terbukti tidak kompeten. Namun, ini adalah pertimbangan yang juga berlaku sama untuk calon pemimpin laki-laki.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan lensa kritik matan kontemporer terhadap hadis kepemimpinan perempuan menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan dinamis. Meskipun sanad hadis tersebut sahih, analisis matan yang mempertimbangkan konteks historis, realitas sosiologis, dan prinsip maqāṣid al-sharī'ah menunjukkan bahwa hadis ini tidak dapat serta-merta dijadikan sebagai dalil untuk melarang kepemimpinan perempuan secara mutlak dan universal. Hadis tersebut merupakan respons spesifik Nabi Muhammad SAW. terhadap sistem monarki Persia dan mencerminkan penilaian terhadap suatu konteks partikular, bukan pernyataan tentang ketidakmampuan esensial perempuan.

Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong para ahli hukum Islam, cendekiawan, dan masyarakat untuk mengedepankan pendekatan yang holistik dalam memahami hadis-hadis ahkam. Kritik matan kontemporer, yang terintegrasi dengan maqāṣid al-sharī'ah, menawarkan kerangka metodologis yang kuat untuk merespons tantangan zaman tanpa mengabaikan otoritas teks. Kepemimpinan pada akhirnya harus dinilai berdasarkan kriteria kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, terlepas dari jenis kelaminnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Syatibi, I. I. M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Azami, M. M. (2002). *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Indianapolis: American Trust Publications.
- Engineer, A. A. (2008). *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: New Dawn Press.
- Kamali, M. H. (2005). *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith*. Leicester: Islamic Foundation.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (M. J. Lakeland, Penerj.). New York: Basic Books.